

Muhammadiyah Nilai Ada Pelemanan Terhadap Pemberantasan Korupsi

Sabtu, 14-11-2015

Jakarta - Belakangan isu soal KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) cenderung tenggelam dengan isu kabut asap dan berbagai isu lain. Kasus-kasus korupsi berskala besar tidak ditangani dengan baik, dan tidak pula dijadikan komitmen bersama dengan lembaga hukum terkait. Adanya stagnasi dalam proses hukum kasus korupsi sehingga terkesan berlarut-larut dan dibiarkan. Ada indikasi lamanya proses tersebut akibat adanya intervensi politik dalam kasus yang sedang diproses. Adanya dugaan pelemanan KPK secara sistematis melalui revisi UU yang sempat mencuat beberapa waktu lalu.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir saat jumpa pers bersama wartawan didampingi Wantimpres, KH Hasyim Muzadi, Ketua PP Muhammadiyah, Yunahar Ilyas, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, dan Bendahara PP Muhammadiyah, Marpuji Ali di gedung PP Muhammadiyah Jakarta, Menteng Raya 62, Jakarta Pusat, Kamis kemarin (12/11).

Haedar Nashir mengajak seluruh pihak untuk ikut bergerak dalam upaya pemberantasan korupsi. Kita percaya ada (kinerja) dari Kejaksaan, Kepolisian, tapi kita agak pesimis jika harus menuntaskan sebuah kasus korupsi tanpa peran institusi KPK," tutur Haedar.

Muhammadiyah memandang sampai saat ini peran KPK masih sangat diperlukan meski ada kepolisian dan kejaksaan yang juga bisa mengusut kasus korupsi. Tanpa KPK, Haedar mengaku pesimistik kasus korupsi bisa terselesaikan.

"Kami mau memberikan dukungan dari sisi moral kepada para pejabat untuk berkomitmen kembali dalam memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi tidak boleh terganggu," kata Haedar.

Hadir pula mantan Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi, yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI (Wantimpres). Hasyim menilai selama ini KPK telah dihantam oleh para koruptor, baik individu maupun berkelompok. "Kami ingin memberikan dukungan moral bagi KPK agar bisa menegakkan fungsinya sampai institusi konvensional efektif memberantas korupsi," katanya. (dzar)

Pernyataan Pers PP Muhammadiyah, Tentang Masalah Korupsi dan Eksistensi KPK

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Kantor Jakarta :
Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta 10340
Telp. (021) 3903021-22
Fax. (021) 3903024

Kantor Yogyakarta :
Jl. Cik Ditiro No. 23 Yogyakarta 55225
Telp. (0274) 553132
Fax. (0274) 553137

Web site : <http://www.muhammadiyah.or.id> Email : muhammadiyahpusat@yahoo.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN PERS
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
TENTANG MASALAH KORUPSI DAN EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

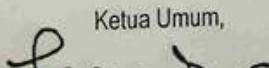
Bismillahirrahmanrrahim

Mengikuti dinamika dan perkembangan pemberantasan korupsi dan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan:

1. Menghargai tekad dan langkah Pemerintah untuk pemberantasan korupsi, tapi prihatin dengan masih tingginya korupsi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan. Pertama, penegakan hukum yang masih lemah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah bahkan melihat adanya usaha-usaha sistematis yang berusaha melemahkan eksistensi dan peran lembaga pemberantasan korupsi, khususnya KPK. Kedua, adanya tumpang tindih dan kurangnya kerjasama antara lembaga-lembaga negara, khususnya antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Ketiga, adanya intervensi politik baik dari jajaran eksekutif maupun legislatif dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik atau partai politik tertentu. Keempat, belum tumbuh dan berkembang budaya anti korupsi baik di dalam tubuh birokrasi maupun masyarakat. Korupsi cenderung lebih dilihat sebagai masalah politik dan hukum belaka sehingga aspek nilai, moral dan keadabannya kurang mendapatkan perhatian.
2. Muhammadiyah mendukung sepenuhnya eksistensi lembaga KPK. Dalam rangka mendukung kinerja KPK Pemerintah hendaknya segera menetapkan anggota KPK yang baru sesuai dengan hasil seleksi tim dan fit and proper test yang telah dilakukan oleh DPR. Penundaan penetapan anggota KPK akan melemahkan eksistensi KPK secara psikologis, politis dan hukum.

Demikian pernyataan Pers Pimpinan Pusat Muhammadiyah, semoga Allah SWT. meridhoinya.

Jakarta, 30 Muharram 1437 H
12 November 2015 M

Ketua Umum,  Sekretaris Umum, 

